



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC REVENUE AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

Silmi febita¹, Desriadi², Rika Ramadhanti³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan

Email: silmifebita08@gmail.com¹,
desriadi03@gmail.com², rika.rasyidin@gmail.com

ABSTRACT

Digitalization in public services is an innovation that can make administrative and service processes more effective and efficient, including in tax services. This study aims to identify and analyze the implementation of Electronic Revenue. The research was conducted at the Regional Revenue Agency of Kuantan Singingi Regency. This study uses four indicators from the book (Indriyani, 2020), namely E-Leadership, Infrastructure, Information Management, and Resources. The research applied a mixed-method approach with 18 respondents. The results of the study show an average score of 4.39, which falls into the "very good" category, indicating that Electronic Revenue has been well implemented.

Keywords: Implementation, E-Revenue

ABSTRAK

Digitalisasi dalam pelayanan publik merupakan inovasi yang dapat membuat proses pelayanan dan administrasi dapat efektif dan efisien begitu juga dengan pelayanan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Implementasi Elektronik Pendapatan. Penelitian ini berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini menggunakan empat indikator dari buku (Indriyani 2020) meliputi E-Leadership, Infrastruktur, Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya. Penelitian menggunakan mix method dengan responden sebanyak 18 orang. Dengan hasil penelitian menunjukkan rata-rata "4,39" kategori sangat baik yang menandakan E-Pendapatan Terimplementasikan

Kata Kunci : Implementasi, E-Pendapatan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah memiliki peran dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 Ayat 2 menegaskan bahwa "pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan, mengawasi, dan mengatur secara langsung urusan di daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka pemerintah pusat memberikan sebagian urusan kepada daerah yaitu berupa desentralisasi.



Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan anggaran keuangan setiap daerah yang mana setiap tahunnya dibuat untuk dibahas dengan lembaga yang berwenang. Pada APBD terdapat pemasukan dan pengeluaran keuangan. Pendapatan APBD yang berasal dari pendapatan daerah itu sendiri adalah pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan BUMD. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri pajak daerahnya, Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah, terdapat beberapa objek pajak daerah seperti yang tertera di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024.

Di dalam pengelolaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan sebuah aplikasi yang membantu di dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang bernama Elektronik Pendapatan atau E-Pendapatan, aplikasi ini merupakan sebuah inovasi pelayanan berbasis digital. Melalui peraturan Bupati No 32 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi elektronik pendapatan pada badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Elektronik Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara subyektif, meningkatkan ilmu untuk melatih kesiapan berpikir ilmiah untuk menyusun karya ilmiah
2. Secara praktis, hasil pengkajian diinginkan bisa berupa pendapat dan masukan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui implementasi Elektronik Pendapatan,
3. Secara akademis, pengkajian bisa memberikan pendapat dan referensi untuk karya ilmiah jurusan administrasi negara.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai.

Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberikan bahan-bahan, sarana-sarana, instruksi-instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi



pengawas. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Anggara, 2016).

2.1.2 Teori/ Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut (Kurniati et al., 2015).

Menurut suharno di dalam buku (Kurniati et al., 2015 : 13) ada beberapa ciri ciri Kebijakan Publik yaitu :

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
4. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
5. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi atau masalah yang ada.

2.1.3 Teori/Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Menurut Pressman dan Widavsky di dalam buku (Pramono, 2020 : 1) Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

2.1.4 Teori/Konsep Teori *E Government*

Perubahan isu global, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat pula perubahan lingkungan global dan kultur birokrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan upaya meningkatkan



pelayanan terhadap masyarakat, maka pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melaksanakan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut secara luas dalam proses pemerintahan, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government), transparansi dan akuntabel (Hertiarani, 2020).

e-Government telah berkembang dari teknologi informasi (TI) dan khususnya dari teknologi berbasis Web. Sebagai pengembangan dan penerapan masyarakat informasi, sehingga memiliki e-government, teknologi informasi yang diterapkan di lingkungan pemerintah maju pesat. Hal ini diperlukan untuk melihat ke dalam implikasi dan kemajuan teknologi informasi bersama dengan perkembangan masyarakat informasi untuk memahami isi dan makna dari e-government (Indrayani, 2020). Inti dari e-government adalah untuk mengubah administrasi publik untuk berinovasi hubungan internal dan eksternal dengan bantuan teknologi elektronik.

Didalam bukunya (Indrayani, 2020 : 30) menyebutkan bahwa Tujuan utama dari e-government adalah menempatkan pemerintah dalam posisi yang paling efisien dan sebagai bentuk dengan kenyamanan sebaik mungkin dari sudut pandang masyarakat. Hal ini bisa diperoleh dengan mengaktifkan hasil yang lebih baik pada kebijakan, layanan berkualitas tinggi, keterlibatan publik yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pemerintah, dan dengan meningkatkan output kunci lainnya yang mungkin diidentifikasi.

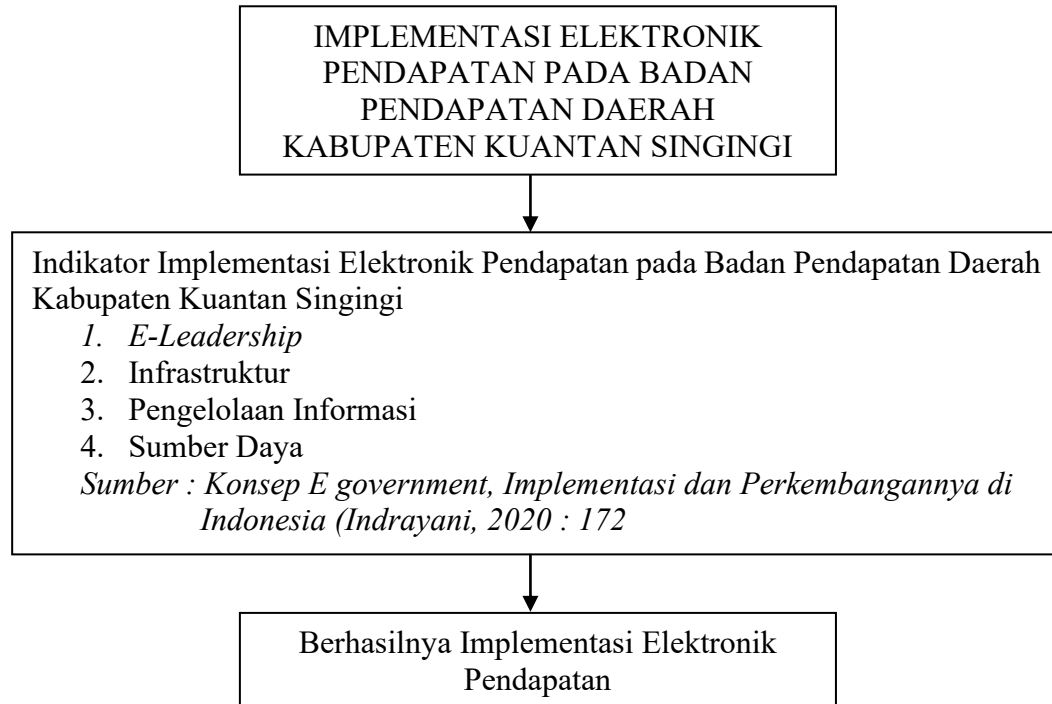
2.1.5 Teori /Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai 'input' untuk diubah menjadi 'output' berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digurunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya (Marnis & Priyono, 2018). Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen yang paling penting. Untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia (MSDM). MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan (*policy*).



2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka pemikiran



Sumber : Modifikasi Penelitian, Tahun 2025

2.3 Defenisi Operasional

1. E-Leadership, Mengacu pada serangkaian kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk membimbing, memengaruhi, dan memotivasi suatu kelompok dengan menggunakan perangkat digital secara cerdas. E-leadership menandakan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi baru secara optimal dalam suatu perusahaan atau organisasi, atau untuk memperkenalkan solusi digital ke dalam sektor tempat seseorang beroperasi. Keterampilan e-leadership terdiri dari kombinasi kemampuan kepemimpinan tradisional dan keterampilan khusus untuk lingkungan digital. Dengan demikian, tradisi dan digitalisasi menyatu menjadi satu sosok.
2. Infrastruktur, Fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan
3. Pengelolaan Informasi, Proses untuk membuat, mendapatkan, mengatur, menyimpan, mendistribusikan, dan menggunakan informasi. Pengelolaan informasi juga dapat diartikan sebagai manajemen proses dan sistem yang memastikan informasi dibuat, diproses, didistribusikan, dan diatur dengan cara yang tepat
4. Sumber Daya, Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.



2.4 Operasional Variabel

Tabel II. 1: Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi	Implementasi Elektronik Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	E-Leadership	Komunikasi Digital
			Pemberdayaan Pegawai Melalui Teknologi
		Infrastruktur	Jaringan Teknologi
			Peralatan Teknologi
		Pengelolaan Informasi	Keamanan Informasi
		Sumber Daya	Sumber Daya Manusia
			Sumber daya Finansial

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2025

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel dari populasi tersebut. (Sugiyono,2018:7)

3.2 Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk lebih jelasnya informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Responden

No	Unsur Informan	Jumlah	
		Jumlah	Key Informan
1	Pegawai Badan Pendapatan Daerah	18	1
Jumlah		3	1

Sumber: Data Olahan Penulis 2025



3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015:156), penelitian dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber, dan cara pengumpulan data. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya, sehingga bersifat asli dan up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (V. Wiratna Sujarweni, 2014:32).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media lain atau dokumen, seperti laporan, arsip, dan dokumen resmi (Dicky, 2021:6; V. Wiratna Sujarweni, 2014:33).

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Kuisioner

Metode pengumpulan data dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden.

3.4.2 Observasi

Penelitian dilakukan dengan cara langsung turun lapangan dengan data data yang penulis butuhkan dalam penelitian

3.4.3 Dokumentasi

Data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teknologi (Kamera) selama melakukan penelitian di lapangan.

3.5 Metode Analisis Data

3.6.1 Penskoran

Menurut (Sugiyono, 2013, hal. 93) skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekumpulan orang mengenai situasi yang terjadi lingkungan sosial.

3.6.2 Penyajian Data

Untuk menyajikan data agar hasilnya berupa angka dan disimpulkan dalam bentuk tabel frekuensi, Rumus persentase yang digunakan untuk menghitung data dalam penelitian ini adalah:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

f = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah frekuensi atau banyak individu

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tentang Implementasi Elektronik Pendapatan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi



berikut ini merupakan keseluruhan tanggapan responden dari penelitian Implementasi Elektronik Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan tabel berikut

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-rata
		Ss	S	Cs	Ts	Sts		
1	e leadership	9	7	0	0	0	16	4,54
		54	46	0	0	0	100	
2	Infrastruktur	7	7	2	0	0	16	4,31
		44	44	12	0	0	100	
3	Pengelolaan Informasi	9	7	0	0	0	16	4,64
		56	44	0	0	0	100	
4	Sumber Daya	6	5	5	0	0	16	4,08
		40	29	31	0	0	100	
Jumlah Responden		8	7	2	0	0	16	4,39
Persentase		48%	41%	11%	0	0	100%	

Dari Tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden adalah 8 orang yang memilih sangat setuju dengan persentase 48%, kategori setuju sebanyak 7 orang dengan persentase 41%, dan cukup setuju sebanyak 2 orang dengan persentase 11%. Maka dari itu rata rata yang didapatkan ialah 4,39. Dari rata rata ini diketahui skala rata rata di kategori sangat baik.

dari hasil rekapitulasi seluruh tanggapan responden didapatkan bahwasanya tiap indikator telah dijalankan sesuai teori yang berlaku mulai dari e leadership yang yang mendapatkan kategori sangat efektif dan dijelaskan melalui wawancara bahwa pemimpin bapenda yang berkomitmen akan perkembangan digitalisasi dalam pelayanan publik, mulai dari inovasi yang dilakukan selama apel pagi, memberikan anggaran yang memadai untuk dapat berkembangnya e pendapatan.

Kemudian dari indikator infrastruktur yang diberikan tanggapan sangat setuju karena didasari bahwa dalam perkembangan e pendapatan bapenda sudah memfalisasi jaringan dengan wifi, komputer yang diupayakan sehingga dapat ditambah dengan diberikannya anggaran Sehingga infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Dalam segi pengelolaan informasi e pendapatan mendapatkan rata rata 4,64 dengan kategori sangat efektif, dalam pengelolaan informasi penyajian data yang diberikan diberikan dalam satu aplikasi yaitu e pendapatan yang dimana sebelumnya data data wajib pajak di input menggunakan excel sehingga data data dapat tercampur dengan data yang lain dan untuk mencari data membutuhkan waktu. Aplikasi e pendapatan sudah diberikan keamanan akses sehingga dapat kerahasiaan data dapat terjaga

Dan dari segi sumber daya yang terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial juga sudah sangat bagus, para pegawai sudah



memiliki keterampilan dalam mengoperasikan e pendapatan dan terus melakukan komunikasi secara berkala terkait perkembangan e pendapatan, selanjutnya dari segi finansial e pendapatan sudah di dukung melalui anggaran anggaran yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R., Nussifera, L., Wahyudi, Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurialia, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikham, F. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Anggara, S. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Asiva, Noor Rachmayani. *Implementasi Kebijakan Publik*. 2015.
- Daulay, Irmayanti, Paten, I. E., & Optimalisasi, D. *Implementasi E-Samsat Paten dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak*. 2021.
- Engkus, H. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)*. 2022.
- Hertiarani, W. "Implementasi Kebijakan E-Samsat di Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 13, no. 3 (2020): 419–440.
- Hidayat, F. *Pembangunan Infrastruktur Digital di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2018.
- Indrayani, E. *E-Government: Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*. LPP Balai Insan Cendikia, 2020.
- Jogiyanto, H. *Pentingnya Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Informasi di Organisasi*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. *Buku Ajar*. 2015.
- Marnis, & Priyono. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2018.
- Pramono, J. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Purwanto, A. *Pengelolaan Informasi untuk Pengambilan Keputusan dalam Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sari, D. R., & Amrozi, F. "Analisis Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Politeknik Penerbangan Surabaya (Studi Kasus Saat Terjadi Wabah Covid-19)." *Jurnal Penelitian Politeknik Penerbangan Surabaya* 5, no. 4 (2020).
- Setiawan, A. "Pembangunan Infrastruktur Digital dalam Perekonomian Digital." *Jurnal Teknologi dan Informasi* 12, no. 2 (2020): 45–56.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sujarweni, V. W. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sutanto, A. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Informasi dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Ummah, M. S. "Yuliah." *Sustainability (Switzerland), Implementasi Kebijakan Pendidikan*. 2019.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Masita, Meilida Eka Sari. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Sumber Lainnya

<https://kuansing.go.id/id/blog/e-pendapatan-kuansing-segera-koneksi-dengan-bankriaukepri.html>

<https://kuansing.go.id/id/blog/aplikasi-e-pendapatan-permudah-masyarakat-bayar-pajak.html>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi.